

**STRATEGI ORGANISASI  
DALAM UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
BEKASI**

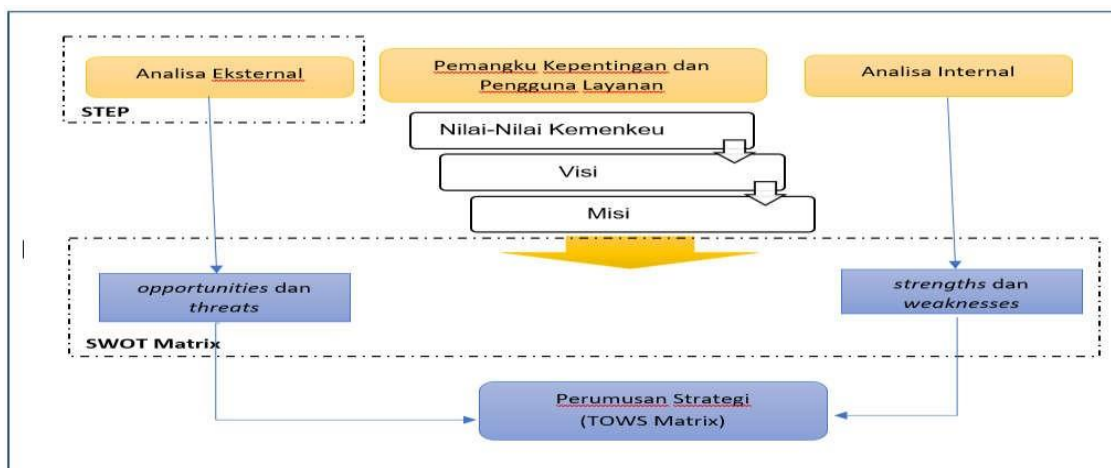


**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI  
TAHUN 2022**

## STRATEGI ORGANISASI KPPN BEKASI

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.



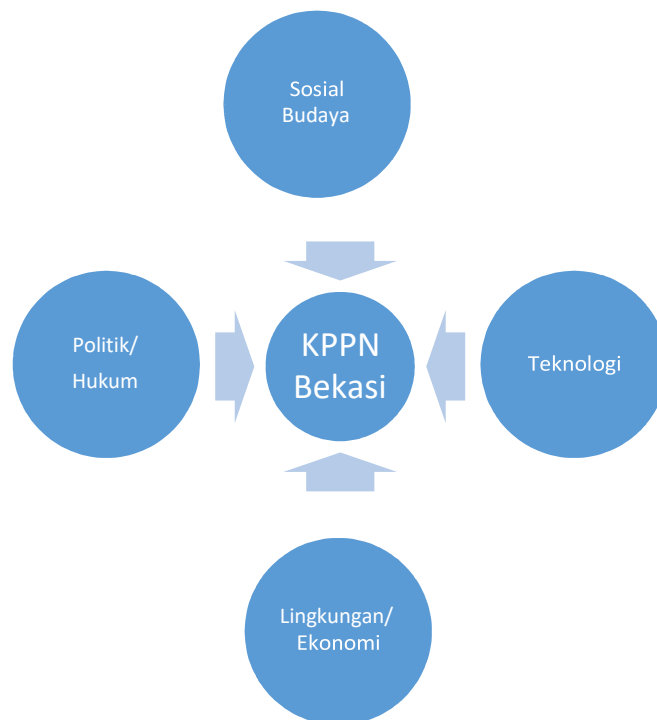
Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi telah menetapkan visi yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut, KPPN Bekasi telah menetapkan misi, yaitu mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelola kas yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi organisasi. Strategi organisasi KPPN Bekasi disusun menggunakan analisis lingkungan internal maupun eksternal. Beberapa alat yang digunakan untuk menyusun strategi organisasi KPPN Bekasi adalah Analisis STEP (Sociocultural, Technological, Environmental, Political), Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), dan pendekatan TOWS berdasarkan Analisis SWOT.

#### A. ANALISIS STEP

Organisasi harus mampu mengidentifikasi isu eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Isu tersebut dapat berasal dari faktor sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan politik/ hukum. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dibutuhkan alat yaitu Analisis STEP.



KPPN Bekasi telah mengidentifikasi isu-isu eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi dengan menggunakan Analisis STEP, antara lain:

1. *Sociocultural*

KPPN Bekasi memiliki 78 satker yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Tantangan yang dihadapi oleh KPPN Bekasi adalah Pengelola Keuangan beberapa K/L mitra kerja merupakan pegawai yang baru ditempatkan di unit tersebut (user baru) sehingga dibutuhkan pendampingan baik dari K/L terkait maupun dari KPPN. Serta Perubahan petugas satker yang dilayani dimana sebagian besar adalah generasi milenial yang memiliki gaya bicara, tingkah laku dan tuntutan yang menginginkan semua pelayanan bisa dilakukan secara cepat;

2. *Technological*

Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2022 seluruh K/L diwajibkan menggunakan Aplikasi SAKTI yang merupakan aplikasi berbasis web. Dibalik kemudahan yang diberikan oleh Aplikasi SAKTI, terdapat tantangan tersendiri bagi K/L karena belum terbiasa dengan aplikasi baru sehingga KPPN Bekasi harus memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi mitra kerja. Selain sosialisasi dan pendampingan, KPPN Bekasi juga melayani konsultasi secara online bagi satker yang menemui masalah dalam pengajuan SPM dan penggunaan Aplikasi SAKTI.

3. *Environmental*

- a. Adanya kebutuhan untuk menerapkan kantor yang ramah lingkungan, maka KPPN Bekasi dituntut mengimplementasikan program go green. Program go green yang telah dilaksanakan oleh KPPN Bekasi antara lain pengurangan secara signifikan penggunaan listrik untuk penerangan di siang hari, penerapan less paper serta meminimalkan penggunaan wadah berbahan plastik.
- b. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk modernisasi layanan KPPN Bekasi yang menjadi beban keuangan negara

4. *Political*

- a. KPPN Bekasi dituntut untuk dapat turut serta dalam menjaga stabilitas politik, khususnya di wilayah kerja KPPN Bekasi.
- b. Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
- c. Semakin besarnya tuntutan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara dengan menghindari kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara

5. *Political*

- a. KPPN Bekasi dituntut untuk dapat turut serta dalam menjaga stabilitas politik, khususnya di wilayah kerja KPPN Bekasi.
- b. Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
- c. Semakin besarnya tuntutan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara dengan menghindari kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara

## B. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Matriks SWOT yang telah disusun oleh KPPN Bekasi adalah sebagai berikut:

STRENGTHS	WEAKNESS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai standar kualitas</li> <li>2. SDM yang kompetitif dan memenuhi syarat kuantitas dan kualitas ABK</li> <li>3. Adanya standardisasi sarana dan prasarana KPPN yang modern</li> <li>4. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kecepatan pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kualitas minimum BMN lingkup Kemenkeu harus ditingkatkan</li> <li>2. Pengelolaan organisasi yang adaptif dan fleksibel harus lebih ditingkatkan</li> <li>3. Kepatuhan pengguna layanan terhadap regulasi</li> </ol>
OPPORTUNITIES	THREATS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan program tawaran diklat yang disediakan oleh kantor pusat</li> <li>2. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk inovasi atas layanan kepada mitra kerja</li> <li>3. Meningkatkan kinerja untuk menjadi KPPN terbaik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya <i>force majeure</i> (pandemi COVID-19) yang mengganggu pelayanan</li> <li>2. Adanya gangguan jaringan</li> <li>3. Kemampuan mitra kerja yang beragam dalam memanfaatkan perkembangan teknologi</li> </ol>

## C. ANALISIS TOWS

Analisa TOWS adalah metode dalam merumuskan strategi organisasi yang secara komprehensif dan sistematis menganalisis faktor eksternal dan internal untuk mengevaluasi posisi *competitiveness* (daya saing) saat ini dan peluang dimasa depan. Analisa TOWS sangat berkaitan erat dengan SWOT, dengan pilihan kombinasi *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats* organisasi. Pilihan kombinasi dalam formulasi strategi organisasi dituangkan dalam Matriks TOWS. Formulasi strategi organisasi disimpulkan dengan mencantumkan kombinasi yang dipilih pada Matriks TOWS, dengan kombinasi:

1. Strategi SO, yaitu memanfaatkan *strengths* yang dimiliki untuk menangkap *opportunities* yang ada.
2. Strategi WO, yaitu mengurangi *weakness* untuk menangkap *opportunities* yang ada.
3. Strategi ST, yaitu menggunakan *strengths* untuk menanggulangi *threats*.
4. Strategi WT, yaitu mengurangi *weakness* agar mampu memitigasi *threats*.

Analisa Matriks TOWS lebih memastikan kita dapat memperhitungkan dan memanfaatkan dengan baik setiap peluang di luar dan di saat bersamaan juga dapat mengetahui dan memanfaatkan potensi internal. Dengan menganalisa eksternal tersebut (Matriks TOWS) kita juga mampu mengantisipasi tantangan dari setiap perubahan eksternal, bahkan mengubahnya (tantangan) menjadi peluang baru. Matriks TOWS KPPN Bekasi adalah sebagai berikut:

	<p><b>Weaknesses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kualitas minimum BMN lingkup Kemenkeu</li> <li>2. Pengelolaan organisasi yang adaptif dan fleksibel harus lebih ditingkatkan</li> <li>3. Kepatuhan pengguna layanan terhadap regulasi</li> </ol>	<p><b>Strengths</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai standarkualitas</li> <li>2. SDM yang kompetitif dan memenuhi syarat kuantitasdan kualitas ABK</li> <li>3. Adanya standardisasi sarana dan prasarana KPPNyang modern</li> <li>4. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan tusi</li> </ol>
<p><b>Threats</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya <i>force majeure</i> (pandemi COVID-19) yang mengganggu pelayanan</li> <li>2. Adanya gangguan jaringan</li> <li>3. Kemampuan mitra kerja yang beragam dalam memanfaatkan perkembangan teknologi</li> </ol>	<p><b>WT: mini-mini strategy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konsultasi Aplikasi SAKTI secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas jaringan (internet) guna meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada satker</li> </ol>	<p><b>ST: maxi-mini strategy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali kebutuhan pengguna layanan dan menindaklanjutinya</li> <li>2. Melayani konsultasi tatapmuka dengantetap memperhatikan protokol kesehatan</li> <li>3. Selalu memberitahukan peraturan terbaru kepada satker melalui media sosial</li> </ol>
<p><b>Opportunities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan program tawaran diklat yang disediakan oleh kantor pusat</li> <li>2. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk inovasi atas layanan kepada mitra kerja</li> <li>3. Meningkatkan kinerja untuk menjadi KPPN terbaik</li> </ol>	<p><b>WO : mini-maxi strategy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk pegawai untuk melakukan diklat/<i>e-learning</i> untuk meningkatkan kapasitasnya</li> <li>2. Membuat inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>3. Mengadakan <i>capacity building</i> bagi seluruh pegawai</li> <li>4. Menambah <i>Trainer</i> SAKTI untuk melayani konsultasisatker</li> </ol>	<p><b>SO: maxi-maxi strategy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan media sosial KPPN Bekasi untuk melakukan sosialisasi</li> <li>2. Meningkatkan penggunaan Telegram dan WhatsApp Group Satker untuk menyampaikan kewajiban yang harus dipenuhi dan peraturan terbaru</li> <li>3. Selain konsultasi tatap muka, konsultasi secara daring juga terus ditingkatkan</li> <li>4. Memberikan pelatihan terhadap <i>trainers</i> Aplikasi SAKTI yang baru</li> </ol>

Dengan melakukan penyusunan strategi organisasi menggunakan tiga *tools* tersebut, KPPN Bekasi sebagai sebuah organisasi diharapkan mampu memerhatikan pengaruh eksternal serta memanfaatkan potensi internal untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Dibuat di Bekasi,  
Pada tanggal 18 Maret 2022

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bekasi



Ditandatangani secara elektronik  
Hajoe Saptaria